

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam level ekonomi, globalisasi telah menciptakan proses homogenisasi, yakni penyebaran sistem ekonomi pasar ke seluruh kawasan dunia yang berbeda-beda. Sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi liberal adalah adanya kedaulatan pasar dalam proses ekonomi dan mengasumsikan adanya keselarasan kepentingan secara alamiah di antara berbagai manusia dan berbagai bangsa¹ dengan tujuan supaya pasar berjalan ke arah suatu sistem ekonomi pasar bebas dan menerima perdagangan bebas. Prinsip sistem ekonomi pasar mengasumsikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh individu, selama masih mampu ditangani secara individu maka tidak boleh ada intervensi dari negara, karena peran pemerintah yang berlebihan dianggap akan membatasi pasar dan mencegah terjadinya perdagangan yang secara potensial menguntungkan, yang kemudian akan menghambat peningkatan kesejahteraan suatu kelompok individu, suatu bangsa, dan suatu kelompok bangsa.² Oleh karena itu, peran negara menurut kaum liberal hanya diarahkan untuk menyediakan pondasi bagi mekanisme pasar seperti, menjamin keamanan, kepastian hukum, melindungi hak milik, mencegah

¹ Mochtar Mas'ood, *Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008. Hlm. 41.

² *Ibid.*

persaingan tidak sehat atau monopoli dalam pasar, menyelenggarakan pendidikan, dan membangun infrastruktur.³ Oleh karena itu, mayoritas negara di dunia yang menganut sistem ekonomi pasar, maka intervensi negara dalam perekonomian akan berkurang, bahkan perusahaan-perusahaan milik negara yang menjadi lembaga penting keterlibatan pemerintah dalam pasar bebas juga banyak di privatisasi oleh asing, contohnya seperti di Indonesia.

Dalam level politik, globalisasi telah menciptakan suatu kondisi masyarakat dengan pengetahuan yang lebih tinggi, sehingga mendorong pemerintahan di suatu negara menjadi demokratis. Demokrasi adalah konsep barat yang mengutamakan pemerintahan oleh rakyat, dan pengaruhnya telah disebarkan hampir ke seluruh kawasan dunia termasuk Asia Tenggara. Kini, hampir semua negara mengklaim dirinya demokratis hanya karna telah melaksanakan standar umum demokrasi yaitu melakukan pergantian pemimpin melalui pemilihan umum,⁴ contohnya adalah Singapura.

Pemilihan umum Singapura dilakukan sejak tahun 1959 pasca merdeka dari Inggris, tetapi hanya satu partai yang berkuasa hingga kini, yaitu *People's Action Party* sejak Lee Kuan Yew menjabat sebagai Perdana Menteri hingga masa Pemerintahan Lee Hsein Loong saat ini.⁵ Ditengah kondisi negara yang multipartai, Perdana Menteri Lee menciptakan PAP sebagai satu-satunya partai

³ *Ibid.*, hlm. 44.

⁴ Budi Winarno, *Isu-isu Global Kontemporer*, Yogyakarta: CAPS. 2011. Hlm. 123.

⁵ Febbie Adilla Antriksa (2012, April 7), *Demokrasi Semu pada Masa Lee Kuan Yew (1959-1990)*, hlm. 3, diakses dari <http://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/9391/6983> pada tanggal 25 November 2015.

tunggal untuk mengendalikan politik domestik Singapura. Politik dalam negeri merupakan persoalan paling mendasar bagi kelangsungan hidup Singapura yang merupakan negara multietnis dan berada di tengah negara-negara tetangga yang penduduk mayoritasnya Melayu, dan yang jauh lebih besar ukuran geografis, penduduk, dan sumber daya.⁶ Kondisi ini yang membuat Singapura sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah etnis China senantiasa merasa berada di tengah kawasan yang tidak menentu.

Walaupun sudah menjadi negara yang terbuka sejak dijajah Inggris tahun 1819 sampai 1959 karena posisinya sebagai pelabuhan dagang⁷ namun, setelah merdeka dari Inggris hingga bergabung dengan Malaysia tahun 1963, kebijakan ekonominya belum liberal dan masih bertumpu pada industri lokal. Pemerintah saat itu masih menerapkan restriksi bagi kegiatan ekspor impornya.⁸ Mengingat kondisi negaranya yang kecil dan miskin sumberdaya alam, Singapura merasa perlu untuk memperluas pasar domestiknya dan memperluas akses bahan baku untuk industri manufakturnya yang saat itu bertumpu pada produksi karet dan peleburan timah. Selain itu, untuk memperkuat angkatan bersenjata, Singapura juga membutuhkan lahan yang lebih luas untuk latihan militernya.⁹ Oleh karena

⁶ Bambang Cipto, *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007. Hlm. 133.

⁷ Seruni, *Kebijakan Pembangunan Ekonomi Pemerintah Singapura dan Dukungannya terhadap Pengembangan Industri Transportasi Udara Melalui Kerjasama Liberalisasi*, diakses dari <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/135843-T%2027993-Singapura%20dan%20kerja-Metodologi.pdf> pada tanggal 3 Januari 2016.

⁸ Febbie Adilla Antriksa. Op. Cit., hlm.3.

⁹ Bambang Cipto. Op. Cit., hlm. 137.

itu, keputusan yang diambil pemerintah PAP pada saat itu adalah bergabung dengan Malaysia.¹⁰

Namun, dua tahun setelah bergabung, Singapura melepaskan diri dari Malaysia karena konflik etnis yang berkepanjangan diantara keduanya. Konflik itu disebabkan karena adanya persaingan antara konsep Bumiputera¹¹ yang diterapkan pemerintah Malaysia di bawah Tenku Abdul Rahman, dan konsep *Malaysian Malaya*¹² yang diterapkan oleh PM Lee Kuan Yew. Konflik itu berujung pada kerusuhan yang diakibatkan oleh orang Melayu Malaysia yang mengadakan demo di Singapura, ketika PAP yang dipimpin Lee Kuan Yew berhasil memenangkan pemilu di parlemen menggantikan MAC (*Malaysian Chinese Association*), partai representasi masyarakat China di Malaysia, tahun 1964. Dalam kerusuhan itu telah menewaskan 22 orang, 200 cedera dan 1130 ditangkap.¹³

Setelah menjadi republik independen pada 9 Agustus 1965,¹⁴ untuk menghindari kerusuhan etnis dan munculnya partai oposisi demi stabilitas politik Singapura, pemerintah Singapura di bawah Perdana Menteri Lee Kuan Yew

¹⁰Lee Kuan Yew, *Amanat Hari Kebangsaan*. 1975, diakses dari http://www.nas.gov.sg/1stCab/LiveNotes_pdfs/Malay.pdf pada tanggal 5 Januari 2016. Hlm.3.

¹¹Bumiputer adalah terminologi Malaysia untuk mendeskripsikan penduduk asli Asia Tenggara, terutama Malaysia.

¹²Meritokrasi adalah semangat kebangsaan tanpa medasarkan pada suatu etnis tertentu.

¹³Ahmad Kassim, *Satu Konsep Sejarah Kebangsaan Malaysia*, Dewan Masyarakat. 1975. Hlm. 49.

¹⁴Lee Kuan Yew. Op. Cit., hlm.3.

menyusun strategi pembangunan dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain, bina bangsa dan pertumbuhan ekonomi.¹⁵

Bina bangsa yang dilakukan pemerintah seperti melalui pelatihan wajib militer Jasa Nasional bagi laki-laki berumur 18 tahun keatas, pendirian sekolah maupun lembaga pendidikan, yang bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil, penempatan masyarakat pada perumahan-perumahan estet, dan menghimbau masyarakat untuk melakukan perayaan-perayaan kebudayaan dan hari raya nasional.¹⁶ Tindakan bina bangsa itu dirasa penting bagi PM Lee untuk menanamkan identitas nasionalisme *Singapore-an*. Jika nasionalisme tiap individu kuat, ia tidak akan mempermasalahkan lagi dari etnis atau agama mana seseorang berasal, sehingga rakyat akan terintegrasi untuk mendukung pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Singapura.¹⁷

Untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi yang kuat, maka perlu peran negara yang kuat. Seperti yang dikemukakan oleh Francis Fukuyama, bahwa berlanjutnya konflik horizontal atau perang sipil, meningkatnya aksi-aksi terorisme, bertahannya tingkat kemiskinan, bencana kelaparan, penyebaran penyakit dan meningkatnya penderita HIV/AIDS di berbagai negara, bukanlah hal-hal yang berdiri sendiri, melainkan merupakan gejala politik di mana negara

¹⁵Triono Akhmad Munib, *Demokrasi 'ala' Lee, Mahathir, dan Soeharto*, diakses dari <http://ideantara.com/pdf/?id=474> pada tanggal 6 Januari 2016.

¹⁶*SG Fact*, About Singapore, diakses dari <http://app.singapore.sg/about-singapore/sg-facts> pada tanggal 17 Februari 2016.

¹⁷Febbie Adilla Antriksa (2012, April 7), *Demokrasi Semu pada Masa Lee Kuan Yew (1959-1990)*, diakses dari <http://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/9391/6983> pada tanggal 25 November 2015.

sebagai institusi terpenting dalam masyarakat gagal menjalankan perannya.¹⁸ Oleh karena itu, pemerintahan PAP memerlukan kebijakan yang tidak banyak mendapat perlawanan, dengan cara menutup pintu bagi partisipasi politik terbuka (sebagaimana di negara demokrasi maju) dan menindas oposisi agar pertumbuhan dan pembangunan ekonomi menjadi andalan utama kemajuan bangsa. Tindakan pemerintah itu didukung dengan pemberlakuan undang-undang keamanan dalam negeri *Internal Security Act*¹⁹ sebagai pembenaran atas tindakan pemerintah yang berkuasa.

Selalu menyadari sebagai negara kecil dan miskin sumberdaya alam, serta modal dalam negeri yang terbatas, maka untuk menjamin keberlangsungan hidupnya, pemerintah Singapura mengarahkan kebijakannya menjadi liberal, terbuka terhadap pasar bebas dan melakukan peningkatan industri untuk menarik investasi asing.²⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijabarkan diatas maka penulis mencoba membuat suatu rumusan masalah, yaitu *“Bagaimana pemerintah Singapura mempertahankan dominasinya dalam pembangunan ekonomi Singapura yang liberal?”*

¹⁸Manuel Kaisiepo, *Soft State dan Powerhose State*, Unisosdem.org, diakses dari http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=5500&coid=3&caid=3&gid=3 pada tanggal 3 Januari 2016. 12 juni 2015

¹⁹Sebuah undang-undang yang bertujuan untuk memberikan keamanan internal bagi Singapura.

²⁰Triono Akhmad Munib, *Demokrasi 'ala' Lee, Mahathir, dan Soeharto*, diakses dari <http://ideantara.com/pdf/?id=474> pada tanggal 6 Januari 2016.

C. Kerangka Pemikiran

Untuk menganalisa penelitian ini lebih mendalam, maka dibutuhkan sebuah kerangka pemikiran untuk membangun sebuah pernyataan yang mengandung variabel-variabel yang memiliki keterkaitan untuk membangun sebuah fakta dari sebuah penelitian agar fakta tersebut menjadi sebuah karya ilmiah yang valid. Sedangkan dalam hal ini, penulis akan menggunakan Konsep Kapitalisme Negara atau *State Capitalism*.

State Capitalism

Konsep dari ekonomi liberal adalah dengan tujuan supaya pasar berjalan kearah suatu sistem ekonomi pasar bebas dan menerima perdagangan bebas. Sistem ekonomi kapitalis ini diperkenalkan oleh Adam Smith, seorang tokoh ekonomi liberal klasik. Untuk menjelaskan bagaimana peran negara agar tetap dominan dalam sistem ekonomi liberal dan mampu mewujudkan kesejahteraan umum, maka kemudian terlahirlah sebuah sistem baru yang dipengaruhi oleh pemikiran *Friedrich List* yaitu *state capitalism*.

Kapitalisme negara atau *state capitalism* sesungguhnya memiliki berbagai makna, tetapi biasanya digambarkan sebagai kegiatan ekonomi secara komersial (*profit-seeking*) yang dilakukan oleh negara melalui tenaga-tenaga manajemen produktif dengan cara-cara kapitalis. Keberadaan *state capitalism* di dalam sebuah negara ditandai dengan adanya dominasi dari sebuah perusahaan besar

milik negara atau BUMN yang melakukan aktivitas monopoli usaha atas izin dari pemerintah.²¹ Dari sisi ini pemerintah bertindak sebagai kontrol terhadap perusahaan-perusahaan dan secara efektif bertindak sebagai kapitalis besar serta pemegang saham itu sendiri. *State capitalism* juga merujuk pada suatu sistem ekonomi dimana alat-alat produksi dimiliki secara pribadi oleh perusahaan dan negara juga dapat mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya sehingga perekonomian negara semakin kuat ditambah dengan upah buruh yang begitu rendah menjadi keuntungan utama dari sistem ini. Disamping itu, negara memiliki peran sebagai kontrol makro atas investasi yang dilakukan oleh para pemilik modal.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya kapitalisme negara dapat digunakan sebagai landasan untuk menggambarkan sebuah sistem, dimana campur tangan negara dalam perekonomian nasional cukup memiliki andil yang besar dalam mengupayakan perlindungan dan memajukan kepentingan ekonomi nasional dan berskala internasional, sehingga negara memiliki peran sebagai kontrol investasi dan juga sekaligus sebagai pemilik saham. Selain itu, negara juga memiliki wewenang untuk mengontrol investasi asing yang akan melakukan aktifitas bisnis di negara mereka, sehingga negara masih dapat memonopoli aktifitas bisnis. Selanjutnya, intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi tidak

²¹George Friedrich List, *National Economy*, diakses dari <http://www.fordham.edu/halsall/mod/1856list.asp> pada tanggal 20 Desember 2015.

hanya berdampak pada keuntungan bisnis semata tetapi juga pada kesejahteraan umum masyarakatnya.

Liberalisasi pembangunan ekonomi Singapura diikuti oleh pembukaan pasar secara bebas dan peningkatan industri. Di awal proses liberalisasi ekonominya, pemerintah Singapura mulai mengelola dengan lebih baik dan mendirikan lembaga-lembaga ekonomi negara seperti, badan *Statutory Board* perusahaan-perusahaan besar milik negara dan semi negara atau *Government-Linked Companies* (GLCs) dan *Government Holdings Company*.²² Perusahaan-perusahaan milik negara yang didirikan oleh pemerintah adalah dalam sektor kunci seperti, manufaktur, keuangan, perdagangan, transportasi, pembuatan kapal, dan jasa.²³ Perusahaan-perusahaan itu dibangun untuk dapat berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan sektor privat.

Untuk menarik investasi asing, di awal kemerdekaan, pemerintah Singapura melalui Economic Development Board (EDB), salah satu badan *statutory board* milik pemerintah melakukan tiga tahap pembangunan:²⁴ *pertama*, periode 1965-1969. Pada tahun 1967, pemerintah menerapkan kebijakan *Economic Expansion Incentives Act* yang tujuannya untuk menarik investasi asing

²²Jean E. Abshire, *the Greenwood Histories of The Modern Nations; The History of Singapore*, California: Greenwood, 2011. Hlm.7.

²³ Carlos D. Ramirez, Ling Hui Tan, *Singapore, Inc. Versus the Private Sector: Are Government-Linked Companies Different?*, International Monetary Fund, hlm. 7. diakses dari <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2003/wp03156.pdf> pada 20 Februari 2016.

²⁴*Our History, About Singapore*, diakses dari http://www.edb.gov.sg/edb/sg/en_uk/index/about_edb/our_history pada tanggal 18 Februari 2016.

masuk ke Singapura.²⁵ Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah menawarkan dana-dana intensif, seperti pajak yang rendah bagi para investor, kemudian tenaga kerja dengan gaji rendah.

Pada periode ini, pemerintah melakukan pembangunan untuk menciptakan infrastruktur yang kondusif bagi industri padat karya. Selain itu, pemerintah meningkatkan modal perusahaan pemerintah yang sudah ada dalam bidang manufaktur, seperti NatSteel. Selanjutnya, pemerintah melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan pada sektor privat yang kurang modal dan ahli seperti Singapore Airlines (perusahaan penerbangan), Neptune Orient Lines (perusahaan pelayaran container global), dan Sembawang Shipyard (perusahaan pembuatan galangan kapal).²⁶ *Kedua*, periode 1970-1979, pemerintah meningkatkan pembangunan pada industri semi-intensif, seperti suku cadang komputer, dan produk-produk elektronik lainnya, di bawah National Computer Board yang dibentuk tahun 1972.²⁷ Dalam periode ini, pemerintah mendirikan perusahaan besar baru yang merupakan *join venture* dengan investor asing, yaitu Singapore Refining Company dan Petrochemical Corporation of Singapore,²⁸ dan mendirikan Temasek Holdings sebagai perusahaan investasi atau lembaga besar

²⁵Maria Nova Marannu M, *Kebijakan Pembangunan Ekonomi Pemerintah Singapura dan Dukungannya terhadap Pengembangan Industri Transportasi Udara Melalui Kerjasama Liberalisasi, Singapura dan kerja-Methodologi*, diakses dari <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/135843-T%2027993-Singapura%20dan%20kerja-Methodologi.pdf>, pada tanggal 2 Oktober 2015. Hlm.6.

²⁶ Anang Setiawan, *Strategi Singapura dalam Menghadapi Globalisasi*, Public Policy and Research Center Indonesia (27 Maret 2015), diakses dari <http://pprcindonesia.org/strategi-singapura-dalam-menghadapi-globalisasi/> pada tanggal 5 Oktober 2015.

²⁷ *Our History*, About Singapore. Op. Cit.

²⁸ Carlos D. Ramirez. Loc. Cit., hlm. 4.

pemerintah, yang mengontrol dan mengelola semua saham pemerintah yang berada di dalam *Government-linked Companies* (GLCs) dan mewakili keterlibatan pemerintah secara luas dalam ekonomi nasional.²⁹ *Ketiga*, periode tahun 1980-1989. Pemerintah mulai mengembangkan industri berteknologi tinggi pada kemajuan teknologi, mengembangkan riset dan pengembangan, desain *engineering* dan jasa *software* computer.³⁰ Untuk mendukung investasi pemerintah dalam industri itu, beberapa GLC didirikan, seperti Singapore Technologies Engineering.

Di bawah Perdana Menteri Goh Chok Tong, pada periode tahun 1990an, pemerintah terus memperdalam basis teknologi dengan memberikan dana bagi pelatihan dan pengembangan melalui badan pemerintah, yaitu Telecommunication Authority of Singapore.

Pada periode ini, Singapura tidak lagi hanya bertumpu pada industri elektronik dan *engineering*, pemerintah mulai mengembangkan ekonomi pada industri kimia, farmasi, dan kesehatan, mengembangkan investasi perusahaan lokal keluar negeri, dan memperbarui penekanan pada pengembangan tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan.³¹ Dan di tahap ini, EDB membangun Science Park di National University of Singapore untuk menstimulasi sektor swasta melakukan aktivitas penelitian dan pengembangan, dan pemberian Robot

²⁹ M. Shamsul Haque, *Governance and Bureaucracy in Singapore: Contemporary Reforms and Implications*, International Political Science Review / Revue internationale de science politique Vol.25, No. 2. 2004. hlm. 229, diakses dari <http://www.jstor.org/stable/1601678> diakses tanggal 18 Januari 2016.

³⁰ *Our History*, About Singapore. Op. Cit.

³¹ *Our History*, About Singapore. Op. Cit.

Leasing Scheme untuk menawarkan pembiayaan dengan ongkos yang rendah bagi konsultasi teknis manufaktur yang ingin mengotomasi proses produksinya.³²

Sedangkan pada masa PM Lee Hsein Long, kebijakan ekonomi pemerintah adalah melakukan pembangunan dibidang industri media digital dan interaktif dan lebih menekankan dalam mengelola ketergantungan tenaga kerja asing, dengan meningkatkan keahlian dan produktivitas pekerja lokal melalui kerjasama dengan sektor privat.³³

Intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi tidak hanya berdampak pada keuntungan bisnis semata tetapi juga pada kesejahteraan umum masyarakatnya. Hal itu dapat dilihat bagaimana Singapura berhasil menjadi salah satu negara maju di kawasan Asia Tenggara dan berhasil mendapat gelar negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, (dengan pertumbuhan PDB 17,9% pada pertengahan 2010 setelah berkurang -6,8% pada kuartal keempat tahun 2009), selanjutnya, tahun 2011 PDB meningkat sebesar 6,2%, dan tahun 2012 PDB meningkat sebesar 3,4%. Selain itu, Singapura mendapatkan peringkat pertama dalam Indeks Kualitas Hidup (terbaik di Asia dan peringkat sebelas di dunia).³⁴

³² *Our History*, About Singapore. Op. Cit.

³³ *Structural Policy Country Notes: Singapore*, diakses dari <http://www.oecd.org/dev/asia-pacific/Singapore.pdf> pada tanggal 18 Februari 2016.

³⁴ *Our History*, About Singapore. Op. Cit.

D. Hipotesa

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat diambil kesimpulan sementara bahwa, pemerintah Singapura mempertahankan dominasinya dalam pembangunan ekonomi Singapura yang liberal adalah melalui *state capitalism* berupa kepemilikan modal dan saham di dalam lembaga-lembaga ekonomi yang dibangun oleh pemerintah, sehingga pemerintah mampu mengontrol investasi dan mewujudkan kesejahteraan umum.

E. Jangkauan Penelitian

Dalam pembahasan mengenai dominasi pemerintah Singapura terhadap pembangunan ekonomi Singapura yang dilakukan melalui liberalisasi ekonomi akan memiliki cakupan pembahasan yang cukup luas. Maka, untuk menjaga keutuhan dari objek yang akan diteliti sehingga data yang diperoleh dapat dianalisis secara menyeluruh, penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti pada: Periode pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Singapura di bawah tiga Perdana Menteri yaitu dimulai pada tahun 1965 sampai 2012. Dan pembahasan beberapa perusahaan milik pemerintah yang berada di bawah kelola Temasek Holdings.

F. Metode Penelitian

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan tulisan ini, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi pustaka. Data-data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini.³⁵ Adapun data-data diperoleh dan diolah melalui buku-buku, surat kabar dan majalah, jurnal ilmu sosial dan politik, serta data dari *website*.

2. Teknik Analisis

Teknik analisis yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif-analisis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana pemerintah mempertahankan dominasinya dalam pembangunan ekonomi Singapura yang liberal. Selain itu juga, deskripsi dimaksudkan untuk melukiskan fakta dan data seperti apa adanya, dan analisis yang dimaksudkan untuk menemukan adanya hubungan antar variabel yang ada, memahami dan menginterpretasikan hubungan-hubungan tersebut dan akhirnya menarik suatu kesimpulan.

³⁵ Sutrisno Hadi, *Methodologi Research 1*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjja Mada, Yogyakarta. 1984. Hlm.57.

G. Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan

Bab ini berisi mengenai latar belakang permasalahan serta pokok permasalahan yang akan dibahas, selain itu juga merumuskan beberapa hal pokok antara lain, kerangka teori, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. Kemunculan Pemerintahan Otoriter di Singapura

Pada bab ini, penulis akan memaparkan mengenai munculnya pemerintahan otoriter di Singapura, yang kemudian menjadi latar belakang munculnya dominasi negara dalam kegiatan ekonomi.

Bab III. Posisi Singapura sebagai Kekuatan Ekonomi Dunia

Pada bab ini, penulis akan memaparkan data-data yang menunjukkan bagaimana Singapura mampu dikatakan sebagai kekuatan ekonomi dunia.

Bab IV. Dominasi Pemerintah Singapura dalam Pembangunan Ekonomi Singapura yang Liberal

Pada bab ini, penulis akan memaparkan bagaimana pemerintah Singapura mempertahankan dominasinya dalam pembangunan ekonomi Singapura yang liberal, di bawah tiga periode Perdana Menteri, mulai tahun 1965-2012.

Bab V. Kesimpulan

Bab ini berisi rangkuman atau kesimpulan dari pembahasan penelitian, serta menutup hasil dari penelitian.